

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrohman, Fauzi dan Onang Witcjaksono. 2021. *Hukum Agraria*. Semarang: Undip Press.
- Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Apriyanto, Mulono. 2022. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Budiarta. 2016. *Hukum Outsourcing Konsep: Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dinatha, I M P. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fea, D.R.O. 2018. *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality
- Harini, R. 2020. *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan*. UGM PRESS.
- Ishaq. I. 2017. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini dan anggraeni A.Lubis. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Pareke, J.T. 2020. *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Melalui Pendekatan Trinity Protection Of Sustainability Concept)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Pribadi, Rahmad. 2017. *Memupuk Kesuburan Menebar kemakmuran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Rachim, Djunaedi dan Mahfud, Arifin. 2011. *Dasar-Dasar Klasifikasi Taksonomi Tanah*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Ritung, S., dkk. 2015. *Sumber daya lahan pertanian Indonesia: luas, penyebaran, dan potensi ketersediaan*. IAARD Press.
- Rusono, Nono. 2015. *Evaluasi Implementasi Kebijakan "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*. Jakarta Pusat: Direktorat Pangan dan Pertanian.
- Rustam, dkk. 2014. *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Santoso, Urip. 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Penerbit Kiara Media.
- Soekanto, Soejono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisna, Gde dan Partama, Yudha. 2021. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Tinjauan Kebijakan*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama
- Ulum, M C., dan Niken Lastiti V A. 2020. *Community Empowerment*. Malang: UB Press.
- Widowaty, Yeni. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan yang Digunakan untuk Perumahan*. Yogyakarta: UMY Press.

#### **Artikel dalam Jurnal**

- Al Arif, M. Y. (2019). "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif". *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (hlm.169-192).
- Ayunita, K. T., dkk. (2021). "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (hlm.160-164).
- Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia". *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, Volume 2, Nomor 2 (hlm.122-130).

- Carayannis, E. G., and Campbell, D. F. J. (2009). "Mode 3 and Quadruple Helix: toward a 21st century fractal innovation ecosystem". *International journal of Technology Management*, Volume 46, Nomor 3 (hlm.201-234).
- Dahiri, D. (2021). "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Volume 6, Nomor 1 (hlm.1-16).
- Dewinta, D., & Warlina, L. (2017). "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur". *Jurnal Wilayah Dan Kota*, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 91-104).
- Fitriadi, A. (2018). "Upaya Pengembangan Pertanian Organik di Lahan Basah dan Lahan Kering (Pemetaan Biologi Tanah pada Daerah Pertanian Organik di Selingkar Gunung Merapi)". *Graha Tani*, Volume 4, Nomor 2 (hlm.629-640).
- Ikhwanto, A. (2019). "Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1 (hlm.60-73).
- Imron, M. (2020). "Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan". *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, Volume 4, Nomor 2 (hlm.68-74).
- Hastuty, Sri. (2018). "Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian". *Prosiding Seminar Nasional*, Volume 3, Nomor 1 (hlm.253-257).
- Kismartini, K., dkk. (2022). "Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, Volume 10, Nomor 2 (hlm 401-415).
- Kusniati, Retno. (2013). "Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan". *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2 (hlm.1-30).
- Leydesdorff, L. (2012). "The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy". *Journal of the Knowledge Economy*, Volume 3, Nomor 1 (hlm.25-35).
- Mariadi, N. N., dan Surata, I. G. (2023). "Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1 (hlm.143-149).
- Muryono, S., dan Utami, W. (2020). "Pemetaan potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 6, nomor 2 (hlm.201-218).



- Naufal, M., dkk (2018). “Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria”. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1 (hlm.2028-2047).
- Paturu, I. H., & Yulianingrum, A. V. (2023). “Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2 (hlm.135-157).
- Pitaloka, E. D. A. (2020). “Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dimensi politik hukum penataan ruang”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 1 (hlm.49-78).
- Prayitno, G., dkk. (2020). “Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kota Batu Indonesia”. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Volume 8, Nomor 2 (hlm.135-150).
- Ranga, Marina & Etzkowitz, H. 2013. “Triple Helix System : An Analytic Framework for Innovation Policy and Practice in Knowledge Society”. *Industry and Higher Education*, Volume 27, Nomor 3 (hlm. 237-262).
- Rangkuti, A. I. E., Dantes, K. F., & Yuliantini, N. P. R. (2023). “Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3, Nomor 2 (hlm.1-12).
- Ramadhani, R. (2016). “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 2 (hlm. 84-99).
- Rahayu, Sri. (2013), “The Quadruple Helix Model (Universities, Academic, Entreprises, Government and Community) Sebagai Model Ideal Untuk Sistem Inovasi Lokal Efektif Terkait Penanggulangan Kemiskinan Di Negara Berkembang”, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, 2013.
- Santoso, U. (2015). “Perolehan Hak atas tanah yang berasal dari Reklamasi Pantai”. *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 27, Nomor 2 (hlm.214-225).
- Sihombing, E. N., dkk. (2021). “Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia”. *Jatiswara*, Volume 36, Nomor 1 (hlm.1-10).
- Slamet, R, dkk. (2017). “Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas”. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Volume 16, Nomor 2 (hlm.136-147).
- Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., dan Setianto, M. J. (2023). “Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3, Nomor 4 (hlm.66-78).

- Tejawati, Desy Nurkristia. (2021). "Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing Di Indonesia". *Perspektif*, Volume 26, Nomor 1 (hlm.39-47).
- Widayati, W. (2015). "1.Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.5-11).
- Wulandari, D. A., dan Rahman, A. Z. (2017). "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032)". *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 6, Nomor 2 (hlm.696-708).
- Yunus, A. (2023). "Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang dan Dampaknya Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1 (hlm.277-288).

## **SKRIPSI**

- Amelia, Putri. 2022. *Model Kemitraan Pentahelix Dalam Peningkatan Mutu Pelatihan Keterampilan (Studi Pada Lkp-Lpk Gemilang Kota Tasikmalaya)*. Tugas Akhir (tidak diterbitkan). Jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Pradana, S. B. R. 2020. *Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Garut*. Tugas Akhir (tidak diterbitkan). Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia.
- Rangkuti, Ali Irfan. 2023. *Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng*. Tugas Akhir (tidak diterbitkan). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4).

